Pengaruh Pengembangan Destinasi Wisata Terhadap Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali

Ida Bagus Kade Subhiksu*
Widyaiswara Ahli Utama, BPSDM Provinsi Bali
Email: bagusiastp5@yahoo.com*

ABSTRAK

Perubahan kepemimpinan dalam pengembangan strategi pariwisata dan kebijakan yang bertanggung jawab sebaiknya mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan termasuk pihak industri, masyarakat lokal, kelompok khusus yang mewakili kepentingan lingkungan, serta wisatawan itu sendiri. Pada konteks pembangunan dan pengembangan pariwisata sebagai totalitas produk yakni daya tarik wisata, aksesibilitas, amenitas, dan ansileri diperlukan keterlibatan masyarakat dan kebijakan pemerintah, sehingga dinamika kepariwisataan juga berdampak terhadap isu-isu perubahan kepemimpinan birokrasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan strategis kepariwisataan akibat dari perkembangan dan pembangunan pariwisata tersebut khususnya terkait inovasi sarana dan prasarana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebagai usaha kepemimpinan transformatif dalam konteks menjawab isu perubahan kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan alat analisis statistik deskriptif dan regresi linier untuk dapat mensimulasikan hasil hasil penelitian dengan melakukan survei terhadap responden yang berwisata pada beberapa daya tarik wisata di Bali. Responden penelitian ini berjumlah 465 orang ditentukan secara purposive sampling karena identitas dan jumlah populasi tidak diketahui. Alat analisis korelasi dan regresi linier digunakan untuk menghasilkan deskripsi hasil dan analisis hubungan antara pengembangan destinasi pariwisata Bali terhadap isu perubahan kepemimpinan dalam pembuatan kebijakan strategis pengembangan kepariwisataan di Bali. Isu perubahan kebijakan dalam konteks kepemimpinan transformatif pemerintah daerah Provinsi Bali dalam melakukan perubahan secara strategis sebaiknya tetap sesuai dengan dinamika perubahan dan perkembangan industri kepariwisataan di Bali berdasarkan harapan wisatawan, masyarakat lokal, dan dunia usaha yang didasarkan pada prinsip pembangunan kepariwisataan budaya yang berkelanjutan.

***Kata Kunci**: Isu perubahan, inovasi kepemimpinan, destinasi pariwisata, sinergitas, produk pariwisata*

ABSTRACT

The change in leadership in developing a responsible tourism strategy and policy should take into account the views of several stakeholders including industry, local communities, special groups representing environmental interests, and tourists themselves. In the context of tourism development and development as a totality of products, namely tourist attraction, accessibility, amenities, and ancillary, community involvement and government policies are needed, so that the dynamics of tourism also have an impact on changes in bureaucratic leadership issues in the formulation and implementation of strategic tourism policies as a result of developments and the development of tourism is particularly related to the innovation of facilities and infrastructure that has been carried out by the Provincial Government of Bali as an effort to transformative leadership in the context of addressing the issue of leadership change. This study uses a quantitative approach using descriptive statistical analysis tools and linear regression to be able

to simulate the results of research results by surveying respondents who traveled to several tourist attractions in Bali. The number of respondents in this study amounted to 465 people determined by purposive sampling because the identity and number of the population are unknown. Correlation analysis and linear regression tools are used to produce a description of the results and analysis of the relationship between the developments of Bali's tourism destinations on the issue of leadership change in the strategic policy development of tourism development in Bali. The issue of policy change in the context of the transformative leadership of the provincial government of Bali in making strategic changes should remain by the dynamics of change and the development of the tourism industry in Bali based on the expectations of tourists, local communities, and the business world based on the principle of sustainable development of cultural tourism.

***Keywords**: Issues of change, leadership innovation, tourism destinations, synergy, tourism products*

PENDAHULUAN

Pada konteks kepariwisataan, pengembangan jasa wisata adalah terkait erat dengan usaha menyediakan jasa dan hospitalitas yang dapat mendukung kelancaran perjalanan wisata dimana aktivitas masyarakat di dalam penyediaan jasa, seperti fasilitas akomodasi, atraksi, akses dan amenitas, serta jasa-jasa yang bersifat intangible. Pada sisi yang sama pengaturan lalu-lintas perjalanan wisatawan dan penyediaan media atau paket-paket perjalanan yang memungkinkan wisatawan mampu memperoleh nilai kepuasan berwisata yang tinggi melalui pengelolaan sumberdaya pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan sehingga diperlukan kebijakan pembangunan pariwisata secara konsisten dapat menitikberatkan perhatiannya pada upaya-upaya peningkatan manfaat sosial, ekonomi, budaya, psikologi perjalanan wisata bagi masyarakat dan wisatawan serta evaluasi perkembangan pariwisata melalui suatu tindakan yang terencana, termasuk dalam hal ini adalah perencanaan kebijakan dan pengembangan pariwisata sebagai jembatan membangun isu perubahan (Pitana dan Gayatri, 2005; Utama dan Ruspendi, 2017).

Jauh sebelum pariwisata berkembang di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali, industri pariwisata telah menjadi sektor unggulan bagi beberapa negara yang memiliki destinasi wisata yang diminati oleh wisatawan sehingga masing-masing negara berusaha memberikan layanan yang semakin baik dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh wisatawan, baik itu sarana makanan dan minuman, maupun fasilitas wisata yang semakin menciptakan rasa nyaman. Di sisi lainnya, industri pariwisata memiliki peran penting dalam upaya peningkatan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja serta dalam upaya peningkatan variabel ekonomi makro. Wisatawan Mancanegara berusaha mencari destinasi wisata yang memiliki keunikan seperti pantai, gunung, cagar budaya, tari dan seni. Sebagian besar negara-negara yang telah maju, seperti Prancis, Swiss, dan Austria telah memperoleh peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata sebesar 5% dari Produk Domestic Bruto. Negara-negara tersebut menciptakan peluang kerja dari industri jasa yang terkait dengan pariwisata. Industri jasa ini meliputi jasa transportasi, seperti penerbangan, kapal pesiar dan taksi; layanan perhotelan, seperti akomodasi, termasuk hotel dan resort; dan tempat hiburan, seperti taman hiburan, kasino, pusat perbelanjaan, tempat music dan teater (Ashe, 2005).

Jumlah wisatawan global tumbuh lebih cepat dari perkiraan United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Target 2020 sudah dicapai tahun 2018, artinya jumlah

wisatawan meningkat pesat. Perkiraan jangka panjang dari UNWTO pada 2010 memperkirakan 1,4 miliar kedatangan internasional pada tahun 2020 telah dicapai pada tahun 2018 atau lebih awal dari perkiraan, hal itu karena pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, pembuatan visa yang lebih mudah dan biaya transportasi udara yang lebih terjangkau. Pariwisata ke Timur Tengah dan Afrika tumbuh di atas rata-rata dunia, yakni sebesar 6%, dengan peningkatan 10% di Timur Tengah dan lonjakan 7% untuk Afrika. Asia Pasifik dan Eropa tumbuh sebesar 6%. Sedang turis ke Amerika tumbuh di bawah rata-rata dunia, dengan peningkatan 3%. Untuk kedatangan internasional di Amerika Tengah dan Karibia turun 2%, terpukul oleh dampak badai Irma dan Maria yang menerjang pada September 2017. Prakiraan UNWTO untuk pariwisata internasional pada tahun 2019 diharapkan akan sejalan dengan tren pertumbuhan sebelumnya sebesar 3-4%. Ketidakpastian Brexit, perlambatan ekonomi dan ketegangan geopolitik juga perdagangan bisa menyebabkan traveler untuk menunggu hasilnya. Namun, harga bahan bakar yang stabil, konektivitas udara yang lebih baik dan tingginya traveler negara berkembang dianggap sebagai indikator positif untuk 2019. Berikut data kedatangan wisatawan internasional pada 2018: Total: 1,4 miliar meningkat 6%, Timur Tengah: 64 juta meningkat 10%, Afrika: 67 juta juta meningkat 7%, Asia dan Pasifik: 343 juta meningkat 6%, Eropa: 713 juta meningkat 6%, Benua Amerika: 217 juta meningkat 3% (UNWTO, 2020). Melihat tren positif dari pertumbuhan pariwisata global, optimisasi pembangunan pariwisata sebagai sebuah alternatif pembangunan untuk pengganti sektor agraris dan industri yang cenderung berdampak pada perubahan kepemimpinan birokrasi, sumber daya manusia, dan sumberdaya alam semakin penting untuk dikaji lebih lanjut. Pada pariwisata, terminologi totalitas produk (4A), merupakan penawaran berwujud destinasi wisata kepada wisatawan, yang mencakup attraction (atraksi atau daya tarik wisata), accessibility (aksesibilitas), amenity (amenitas) dan ancillary (Ansilari) yang dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar persaingan destinasi wisata secara global. Middleton dan Strick (1994) berpendapat bahwa pada pemasaran pariwisata terdapat lima elemen yang mesti dilibatkan secara bersama-sama. Lima elemen tersebut adalah elemen permintaan pasar (market demand), elemen biro perjalanan (travel organizers), elemen lembaga-lembaga pariwisata pada destinasi (destination organizers), elemen penawaran (product supply), dan elemen fisik aksesibilitas. Berkembangnya sektor pariwisata juga dapat mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik, penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis dan kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga masyarakat lokal itu sendiri sebagai tuan rumah. Membangun pariwisata berarti sepakat membangun yakni daya tarik wisata khususnya daya tarik wisata man-made, sementara untuk daya tarik alamiah dan budaya hanya diperlukan penataan dan pengemasan. Karena Jarak dan waktu tempuh menuju destinasi akhirnya akan mendorong pemerintah untuk membangun jalan raya yang layak untuk angkutan wisata, sementara fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel, penginapan, restoran juga harus disiapkan (Utama, 2015). Pembangunan infrastruktur pariwisata dapat dilakukan secara mandiri maupun mengundang pihak swasta nasional bahkan pihak investor asing khususnya untuk pembangunan yang berskala besar seperti pembangunan Bandara Internasional, dan sebagainya. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur pariwisata tersebut juga akan dinikmati oleh penduduk lokal dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, dalam konteks ini masyarakat lokal akan mendapatkan pengaruh positif dari pembangunan pariwisata di daerahnya.

Perubahan kepemimpinan dalam pengembangan strategi pariwisata dan kebijakan, otoritas yang bertanggung jawab, harus mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan termasuk industri, penduduk, kelompok khusus yang mewakili kepentingan

lingkungan dan masyarakat, serta wisatawan itu sendiri. Pelibatan stakeholder dalam perumusan strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan kebijakan mungkin menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebuah keharusan mengakomodasi seluruh masukan atau pendapat dari berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam hal identifikasi masalah, legitimasi, keterlibatan dan resolusi konflik. Kerangka stakeholder telah diterapkan dalam hubungannya dengan siklus hidup daerah tujuan wisata dalam rangka menganalisis sikap terhadap pemangku kepentingan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan pariwisata di Indonesia mestinya mempertimbangkan berbagai hal untuk mencapai pariwisata berkelanjutan. Salah satu pertimbangannya adalah pengembangan pariwisata tetap menjaga lingkungan alam dan sumberdaya yang ada sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengentaskan kemiskinan (Rosalina, 2017; Utama, 2017). Namun demikian, berbagai masalah dapat muncul sebagai dampak dari pengembangan pariwisata dapat berupa merosotnya sektor pertanian karena alih fungsi lahan untuk pembangunan pariwisata sehingga mengakibatkan perubahan struktur tanah yang signifikan (Sutawa, 2012; Butarbutar dan Soemarno, 2012).

Provinsi Bali yang merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang ada di Indonesia, yang memiliki banyak daya tarik wisata dan juga keunikan budaya. Kebudayaan di Bali telah menyatu dengan gaya kehidupan masyarakat di Bali, dan telah mampu menopang aktivitas pelestarian lingkungan dan alamnya. Nama Bali juga telah dikenal oleh dunia, karena sejarahnya pada masa kolonial Belanda sampai pada pengembangan saat ini (Arismayanti, 2017). Tonggak sejarah pariwisata Bali dalam konteks pengembangan pariwisata budaya dimulai sejak tahun 1920-an dan secara hukum atau perda dimulai tahun 1974 kemudian dalam perjalanannya direvisi pada tahun 1991 dan tahun 2012. Alternatif untuk menghindari pariwisata massal mulai dikenal sejak tahun 1980-an dengan Pariwisata berbasis masyarakat (Mago, 2011; Rocharungsat, 2005). Implementasi pengembangan pariwisata pelaksanaannya melibatkan komunitas tuan rumah (pedesaan) (Hall and Clover, 2005). Pendapat beberapa akademisi bahwa wisatawan semakin mencari pengalaman yang membawa mereka lebih dekat dengan penduduk lokal (Butcher, 2003; Dolezal, 2011; Wang, 1999). (Mitas, et. al. 2017) meninjau metode pariwisata berbasis masyarakat dan menyoroti kekuatan dominan dalam keberhasilan atau kegagalannya.

Pada konteks pembangunan dan pengembangan pariwisata sebagai totalitas produk yakni daya tarik wisata, aksesibilitas, amenitas, dan ansileri diperlukan keterlibatan masyarakat dan kebijakan pemerintah, sehingga dinamika kepariwisataan juga berdampak terhadap isu-isu perubahan kepemimpinan birokrasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan strategis kepariwisataan akibat dari perkembangan dan pembangunan pariwisata tersebut khususnya terkait inovasi sarana dan prasarana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebagai usaha kepemimpinan transformatif dalam konteks menjawab isu perubahan kepemimpinan (Pitana dan Gayatri, 2005; Utama dan Ruspendi, 2017). Pokok-pokok permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1) Bagaimanakah persepsi wisatawan terhadap keindahan alam Bali (X1), Persepsi wisatawan terhadap keunikan budaya Bali (X2), Persepsi wisatawan terhadap keramahan masyarakat Bali sebagai destinasi wisata (X3), Persepsi wisatawan terhadap pembangunan hotel dan restoran di Bali (X4), Persepsi wisatawan terhadap akses menuju Daya Tarik Wisata dari tempat tinggal mereka (X5), Persepsi wisatawan terhadap moda transportasi yang berkembang saat ini (X6). Persepsi wisatawan terhadap ketersediaan sarana prasarana yang telah dibangun Pemerintah Daerah Bali (Y1), dan Persepsi terhadap keberadaan infrastruktur jalan raya yang telah dibangun Pemerintah Daerah Bali (Y2).

2) Bagaimanakah pengaruh keindahan alam Bali (X1), keunikan budaya Bali (X2), keramahan masyarakat Bali sebagai destinasi wisata (X3), pembangunan hotel dan restoran di Bali (X4), akses menuju Daya Tarik Wisata di Bali (X5), perkembangan moda transportasi saat ini (X6) terhadap respon pemerintah Daerah Provinsi Bali melalui inovasi pembangunan sarana prasarana kepariwisataan (Y1), dan terhadap respon pemerintah Daerah Provinsi Bali melalui inovasi pembangunan infrastruktur jalan raya yang telah (Y2)?

METODE PELAKSANAAN

Pada konteks pengembangan destinasi wisata, akan terkait erat dengan usaha menyediakan jasa dan hospitalitas untuk mendukung kelancaran perjalanan wisata dimana aktivitas masyarakat dapat diarahkan pada usaha penyediaan jasa, seperti fasilitas akomodasi, atraksi, akses dan amenitas, serta jasa-jasa lainnya yang bersifat intangible. Pada sisi yang sama pengaturan lalu-lintas perjalanan wisatawan dan penyediaan media atau paket-paket perjalanan yang memungkinkan wisatawan mampu memperoleh nilai kepuasan berwisata melalui pengelolaan sumberdaya pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pada tujuan tersebut, diperlukan kebijakan pembangunan pariwisata secara konsisten yang menitikberatkan perhatiannya pada upaya-upaya peningkatan manfaat sosial, ekonomi, budaya, psikologi perjalanan wisata bagi masyarakat dan wisatawan, yang perkembangannya dapat dievaluasi melalui suatu tindakan yang terencana, termasuk dalam hal ini adalah perencanaan kebijakan dan pengembangan pariwisata sebagai jembatan membangun isu perubahan atau dalam artian bahwa perubahan kepemimpinan juga diperlukan untuk menjawab isu-isu perubahan dalam pengelolaan pembangunan pariwisata (Pitana dan Gayatri, 2005; Utama dan Ruspendi, 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan alat analisis statistik deskriptif dan regresi linier untuk dapat mensimulasikan hasil hasil penelitian dengan melakukan survei terhadap responden yang berwisata pada beberapa daya tarik wisata di Bali. Responden penelitian ini berjumlah 465 orang ditentukan secara *purposive sampling* karena identitas dan jumlah populasi tidak diketahui. Penggunaan purposive sampling dan penentuan jumlah ini telah dianggap cukup layak sebagai penelitian simulasi survei karena telah memenuhi batas maksimal jumlah sampel Slovin yakni 400 responden (Utama, 2012). Sikap responden diukur dengan skala likert 5 pilihan yang secara langsung menanyakan sikap mereka terhadap Alam Bali saat ini (X1), Persepsi wisatawan terhadap Budaya Bali (X2), Persepsi wisatawan terhadap keramahan masyarakat Bali sebagai destinasi wisata (X3), Persepsi wisatawan terhadap pembangunan hotel dan restoran di Bali (X4), Persepsi wisatawan terhadap akses menuju Daya Tarik Wisata dari tempat tinggal mereka (X5), Persepsi wisatawan terhadap moda transportasi yang berkembang saat ini (X6). Persepsi wisatawan terhadap ketersediaan sarana prasarana yang telah dibangun Pemerintah Daerah Bali (Y1), dan Persepsi terhadap keberadaan infrastruktur jalan raya yang telah dibangun Pemerintah Daerah Bali (Y2). Variabel bebas (X1,2,3,4,5) secara simultan akan dikorelasikan dan diregresikan terhadap variabel terikat (Y1, Y2) yang dianggap sebagai peran perubahan kepemimpinan birokrasi untuk dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan strategis kepariwisataan.

Hasil analisis korelasi dan regresi ini untuk melihat terjadinya dampak pariwisata terhadap perubahan pengelolaan sektor pariwisata itu sendiri terhadap birokrasi pemerintahan khususnya kepemimpinan yang inovatif akibat terjadi perubahan perkembangan kepariwisataan di Bali dengan anggapan bahwa pemimpin yang mampu berinovasi tidak saja diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan melalui fasilitasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,

akan tetapi diperlukan juga inovasi yang mampu sebagai faktor pengungkit potensi dan kekayaan sumberdaya alam dan budaya nusantara yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini sebagai daerah wisata yang maju dan berkelanjutan (Pitana dan Gayatri, 2005; Utama dan Mahadewi, 2012; Utama, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepariwisataan Bali.

Kepariwisataan Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dilandasi filosofi Tri Hita Karana sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal balik yang dinamis antara Kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan, kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan (Utama, 2016).

Perkembangan Bali menjadi destinasi utama pariwisata nasional dan dunia memang telah memberikan kontribusi positif bagi Bali sendiri maupun nasional, namun disisi lain juga menimbulkan dampak negatif yang serius. Fundamental Bali yang meliputi Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali cenderung telah berubah secara masif dan sistemik. Secara keseluruhan telah terjadi penurunan atau degradasi, baik secara kualitas maupun kuantitas, pada Lingkungan Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali. Seiring dengan hal tersebut, sejak tahun 2009 hingga tahun 2018, jumlah wisatawan mancanegara mengalami pertumbuhan positif. Data kunjungan tersebut seperti ditampilkan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Data Wisatawan Mancanegara ke Bali 2009-2018

Tahun	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2009	2.385.122	-
2010	2.576.142	8,01
2011	2.826.709	9,73
2012	2.949.332	4,34
2013	3.278.598	11,16
2014	3.766.638	14,89
2015	4.001.835	6,24
2016	4.927.937	23,14
2017	5.697.739	15,62
2018	6.070.473	6,54

Sumber: BPS, 2019

Pada tahun 2010, pertumbuhan kunjungan mengalami peningkatan sebesar 9,01% terhadap kunjungan tahun 2009. Pertumbuhan kunjungan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 23,14% terhadap kunjungan tahun 2015, namun pada tahun 2017 dan 2018 pertumbuhan kunjungan wisatawan mengalami perlambatan, namun masih tetap meningkat terhadap tahun 2016 dan 2017. Pertumbuhan positif jumlah wisatawan ke Bali berkaitan erat dengan dinamika kebudayaan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang senantiasa melakukan perbaikan dan inovasi terhadap Bali sebagai sebuah destinasi yang mencangkup pada empat aspek (4A) sebagai satu kesatuan totalitas yang saling terintegrasi.

Profil Responden

Penelitian melibatkan 465 responden dengan dominasi responden yang berprofesi sebagai Pelajar atau Mahasiswa sebesar 88,1%, kemudian Pegawai Swasta sebesar 9%, Pegawai Pemerintah sebesar 6%, dan sisanya pengusaha sebesar 3% (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Profil Responden Menurut Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	%
Pelajar/Mahasiswa	381	81,9
Pegawai Swasta	42	9,0
Pegawai Pemerintah	28	6,0
Pengusaha/Wirausaha	14	3,0
Total	465	100,0

Penelitian ini juga dominasi responden yang wisatawan lokal sebesar 85,6%, kemudian wisatawan domestik sebesar 14,2%, dan sisanya wisatawan mancanegara sebesar 0,2% (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Profil Responden Menurut Jenisnya

Asal	Frekuensi	%
Wisatawan Lokal	398	85,6
Wisatawan Domestik	66	14,2
Wisatawan Mancanegara	1	0,2
Total	465	100,0

Penelitian yang melibatkan 465 responden ini mencatat dominasi responden berumur kurang dari 20 tahun sebesar 64,5%, kemudian 21-30 tahun sebesar 22,6%, 31-40 tahun sebesar 6,9%, 41-50 tahun sebesar 3,4% dan sisanya lebih dari 50 tahun sebesar 2,6% (lihat Tabel 4.4).

Tabel 4. Profil Responden Menurut Umur

Umur	Frekuensi	%
Kurang dari 20 Tahun	300	64.5
21 - 30 Tahun	105	22.6
31 - 40 Tahun	32	6.9
41-50 Tahun	16	3.4
Lebih dari 50 Tahun	12	2.6
Total	465	100.0

Persepsi Wisatawan terhadap Variabel Bebas (4A), Inovasi Sarana dan Prasarana oleh pemerintah daerah.

Hasil survei terhadap 465 responden menggambarkan bahwa Persepsi Wisatawan terhadap Variabel Bebas (4A), Inovasi Sarana dan Prasarana oleh pemerintah daerah dapat dlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Persepsi Wisatawan terhadap Variabel Bebas (4A), Inovasi Sarana dan Prasarana oleh pemerintah daerah

Variabel	Mean	Std. Deviation	Keterangan
Keindahan Alam (X1)	4,20	0,796	Setuju
Keunikan Budaya (X2)	4,21	0,744	Sangat Setuju
Keramahan Masyarakat (X3)	4,20	0,728	Setuju
Hotel-Restoran (X4)	4,11	0,743	Setuju
Biro Perjalanan (X5)	4,03	0,784	Setuju
Moda Transportasi (X6)	4,04	0,795	Setuju
Inovasi-Sarpras (Y1)	4,15	0,754	Setuju
Inovasi-Infrastruktur (Y2)	3,99	0,799	Setuju
Valid N (listwise) = 465			

Catatan: Nilai mean adalah nilai yang menunjukkan rata-rata persepsi responden terhadap kategori jawaban responden. Keterangan: Rentang 1,00 - 1,80 bermakna Sangat Tidak Setuju, 1,81 - 2,60 bermakna Tidak Setuju, 2,61 - 3,40 bermakna Kurang Setuju, 3,41 - 4,20 bermakna Setuju, dan 4,21 - 5,00 bermakna Sangat Setuju.

Rata-rata wisatawan setuju dengan variabel Alam (X1), Masyarakat (X3), Hotel-Restoran (X4), Perjalanan (X5), Transportasi (X6) telah berkembang sesuai harapan wisatawan, dan bahkan Budaya (X2) dipersepsikan sangat setuju sebagai daya tarik pariwisata Bali. Sementara untuk variabel Inovasi-Sarpras (Y1) dan Inovasi-Infrastruktur (Y2), wisatawan mempersepsikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan perubahan secara strategis dalam pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan, dan juga membangun infrastruktur yang dapat mendukung kepariwisataan Bali.

Hubungan Simultan antara Variabel Bebas (4A) terhadap Inovasi Sarana dan Prasarana oleh pemerintah daerah.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda antara variabel X dan Y1

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	0,272	0,146		1,869	0,062
Keindahan Alam (X1)	0,158	0,043	0,167	3,693	0,000
Keunikan Budaya (X2)	0,115	0,049	0,114	2,362	0,019
Keramahan Masyarakat (X3)	0,221	0,043	0,213	5,115	0,000
Hotel-Restoran (X4)	0,233	0,047	0,229	4,944	0,000
Biro Perjalanan (X5)	0,038	0,044	0,040	0,872	0,384
Moda Transportasi (X6)	0,172	0,043	0,181	3,954	0,000

a. Dependent Variable: Inovasi-Sarpras (Y1)

1. Pengaruh Keindahan Alam Bali (X1) terhadap Inovasi-Sarpras (Y1) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bali: Nilai signifikansi sebesar (0,000) < 0,05 dapat membuktikan bahwa Keindahan Alam Bali sebagai daya tarik wisata telah mampu menggugah Pemerintah Daerah Bali untuk melakukan perubahan berupa inovasi sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali. Kesimpulannya bahwa kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali telah berdasarkan pengaruh keindahan alam Bali.

2. Pengaruh keunikan Budaya Bali (X2) terhadap Inovasi-Sarpras (Y1) Pemerintah Daerah Bali: Nilai signifikansi sebesar (0,019) < 0,05 dapat membuktikan bahwa Kelestarian Budaya Bali sebagai daya tarik wisata telah mampu menggugah Pemerintah Daerah Bali untuk melakukan perubahan berupa inovasi sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali. Kesimpulannya bahwa kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali telah berdasarkan pengaruh keunikan Budaya Bali.
3. Pengaruh keramahan Masyarakat Bali (X3) terhadap Inovasi-Sarpras (Y1) Pemerintah Daerah Bali: Nilai signifikansi sebesar (0,000) < 0,05 dapat membuktikan bahwa Keramahan Masyarakat Bali sebagai daya tarik wisata telah mampu menggugah Pemerintah Daerah Bali untuk melakukan perubahan berupa inovasi sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali. Kesimpulannya bahwa kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali telah berdasarkan pengaruh keramahan Masyarakat Bali.
4. Pengaruh perkembangan Hotel-Restoran (X4) terhadap Inovasi-Sarpras (Y1): Nilai signifikansi sebesar (0,000) < 0,05 dapat membuktikan bahwa Perkembangan pembangunan Hotel dan Restoran Bali sebagai Amenitas Pariwisata Bali telah mampu menggugah pemerintah daerah untuk melakukan perubahan berupa inovasi sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali. Kesimpulannya bahwa kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali telah berdasarkan pengaruh berkembangnya pembangunan hotel dan restoran di Bali.
5. Pengaruh Layanan Jasa Perjalanan (X5) terhadap Inovasi-Sarpras (Y1) Pemerintah Daerah Bali: Nilai signifikansi sebesar (0,394) > 0,05 tidak dapat membuktikan bahwa pelayanan perjalanan wisata di Bali sebagai ansilari mampu menggugah Pemerintah Daerah Bali untuk melakukan perubahan berupa inovasi sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali. Kesimpulannya bahwa kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali tidak berdasarkan pengaruh berkembangnya layanan jasa perjalanan wisata di Bali.
6. Pengaruh moda transportasi (X6) terhadap Inovasi-Sarpras (Y1) Pemerintah Daerah Bali: Nilai signifikansi sebesar (0,000) < 0,05 dapat membuktikan bahwa Perkembangan Moda Transportasi Kepariwisataan Bali sebagai akses kepariwisataan Bali telah mampu menggugah pemerintah daerah untuk melakukan perubahan berupa inovasi sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali. Kesimpulannya bahwa kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali telah berdasarkan pengaruh berkembangnya moda transportasi di Bali

Hubungan Simultan antara Variabel Bebas (4A) terhadap Inovasi-Infrastruktur oleh pemerintah daerah.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda antara variabel X dan Y2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,349	0,173		2,021	0,044
Keindahan Alam (X1)	0,049	0,051	0,049	0,967	0,334
Keunikan Budaya (X2)	0,103	0,058	0,096	1,781	0,076
Keranahan Masyarakat (X3)	0,169	0,051	0,154	3,306	0,001
Hotel-Restoran (X4)	0,091	0,056	0,085	1,631	0,103
Biro Perjalanan (X5)	0,376	0,052	0,369	7,237	0,000
Moda Transportasi (X6)	0,099	0,052	0,098	1,909	0,057

a. Dependent Variable: Inovasi-Infrastruktur (Y2)

1) Pengaruh keindahan alam Bali (X1) terhadap Inovasi-Infrastruktur (Y2): Nilai signifikansi sebesar (0,334) > 0,05 tidak dapat membuktikan bahwa keindahan Alam Bali sebagai daya tarik wisata mampu menggugah pemerintah daerah untuk melakukan perubahan berupa inovasi Infrastruktur kepariwisataan di Bali. Kesimpulannya bahwa kebijakan pembangunan Infrastruktur kepariwisataan di Bali tidak berdasarkan pengaruh keindahan alam Bali.
2) Pengaruh keunikan Budaya Bali (X2) terhadap Inovasi-Infrastruktur (Y2): Nilai signifikansi sebesar (0,076) > 0,05 tidak dapat membuktikan bahwa Kelestarian Budaya Bali sebagai daya tarik wisata mampu menggugah pemerintah daerah untuk melakukan perubahan berupa inovasi Infrastruktur kepariwisataan di Bali. Kesimpulannya bahwa kebijakan pembangunan Infrastruktur kepariwisataan di Bali tidak berdasarkan pengaruh keunikan budaya Bali.
3) Pengaruh keramahan masyarakat Bali (X3) terhadap Inovasi-Infrastruktur (Y2): Nilai signifikansi sebesar (0,001) < 0,05 dapat membuktikan bahwa Keramahan Masyarakat Bali sebagai daya tarik wisata mampu menggugah pemerintah daerah untuk melakukan perubahan berupa inovasi Infrastruktur kepariwisataan di Bali. Kesimpulannya bahwa kebijakan pembangunan Infrastruktur kepariwisataan di Bali telah berdasarkan pengaruh keramahan masyarakat Bali.
4) Pengaruh berkembangnya Hotel dan Restoran di Bali (X4) terhadap Inovasi-Infrastruktur (Y2): Nilai signifikansi sebesar (0,103) > 0,05 tidak dapat membuktikan bahwa Perkembangan pembangunan Hotel dan Restoran Bali sebagai amenitas Pariwisata Bali mampu menggugah pemerintah daerah untuk melakukan perubahan berupa inovasi Infrastruktur kepariwisataan di Bali. Kesimpulannya bahwa kebijakan pembangunan Infrastruktur kepariwisataan di Bali tidak berdasarkan Pengaruh berkembangnya Hotel dan Restoran di Bali.
5) Pengaruh berkembangnya Biro Perjalanan Wisata di Bali (X5) terhadap Inovasi-Infrastruktur (Y2): Nilai signifikansi sebesar (0,000) < 0,05 dapat membuktikan bahwa Pelayanan Perjalanan Wisata di Bali sebagai ansilari telah mampu menggugah pemerintah daerah untuk melakukan perubahan berupa inovasi Infrastruktur kepariwisataan di Bali. Kesimpulannya bahwa kebijakan pembangunan Infrastruktur kepariwisataan di Bali telah berdasarkan pengaruh berkembangnya Biro Perjalanan Wisata di Bali.
6) Pengaruh berkembangnya moda transportasi di Bali (X6) terhadap Inovasi-Infrastruktur (Y2): Nilai signifikansi sebesar (0,057) > 0,05 tidak dapat membuktikan bahwa Perkembangan Moda Transportasi Kepariwisataan Bali sebagai akses kepariwisataan Bali mampu menggugah pemerintah daerah untuk melakukan perubahan berupa inovasi Infrastruktur kepariwisataan di Bali. Kesimpulannya bahwa kebijakan pembangunan Infrastruktur kepariwisataan di Bali tidak berdasarkan pengaruh berkembangnya moda transportasi di Bali.

KESIMPULAN

Peran pemerintah daerah sebagai jembatan membangun isu perubahan dampak perkembangan kepariwisataan terhadap inovasi kebijakan pemerintah daerah telah terbukti bahwa pemerintah Provinsi Bali telah secara demokratis mendengar dan melakukan sinergisitas dalam melaksanakan pembangunan sebagai respon terhadap kebutuhan wisatawan secara luas untuk mewujudkan citra destinasi yang semakin baik. Peran pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1) Rata-rata wisatawan setuju bahwa keindahan alam Bali, keramahan masyarakat Bali, berkembangnya hotel dan restoran di Bali, berkembangnya jasa layanan perjalanan wisata di

Bali, berkembangnya moda transportasi di Bali telah sesuai harapan wisatawan, dan bahkan keunikan budaya dipersepsikan sangat unik sebagai daya tarik pariwisata Bali. Sementara Inovasi terhadap sarana dan prasarana kepariwisataan serta inovasi terhadap infrastruktur kepariwisataan yang telah dilakukan untuk menangkap isu perubahan kebijakan dalam konteks kepemimpinan transformatif, menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Bali telah melakukan perubahan secara strategis yang sesuai dengan dinamika perubahan dan perkembangan industri kepariwisataan di Bali.

2) Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali telah berdasarkan pengaruh keindahan alam Bali, hal ini dilakukan untuk menjaga dan melestarikan potensi keindahan alam Bali sebagai usaha pembangunan pariwisata berkelanjutan.
3) Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali telah berdasarkan pengaruh keunikan Budaya Bali, hal ini dilakukan untuk menjaga dan melestarikan potensi budaya yang dimiliki oleh Destinasi Pariwisata Bali sebagai usaha pembangunan pariwisata berkelanjutan.
4) Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali telah berdasarkan pengaruh keramahan Masyarakat Bali, hal ini dilakukan untuk menjaga dan melestarikan potensi keramahan Masyarakat Bali dimiliki oleh Destinasi Pariwisata Bali sebagai usaha pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berpihak pada kualitas hidup masyarakat lokal.
5) Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali telah berdasarkan pengaruh berkembangnya pembangunan hotel dan restoran di Bali, hal ini dilakukan karena hotel dan restoran berkontribusi secara langsung terhadap pendapatan asli daerah sehingga pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali menjadi tanggungjawab pemerintah.
6) Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali tidak berdasarkan pengaruh berkembangnya layanan jasa perjalanan wisata di Bali karena usaha jasa layanan perjalanan wisata yang ada Destinasi Pariwisata Bali memiliki jangkauan layanan secara internasional.
7) Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali telah berdasarkan pengaruh berkembangnya moda transportasi di Bali, hal ini dilakukan karena moda transportasi di Bali berkontribusi secara langsung terhadap pendapatan asli daerah sehingga pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali menjadi tanggungjawab pemerintah.
8) Kebijakan pembangunan infrastruktur kepariwisataan di Bali tidak berdasarkan pengaruh keindahan alam Bali, karena kebijakan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk kepentingan lebih luas, yang tidak hanya untuk kepentingan sektor pariwisata saja tetapi untuk kepentingan masyarakat umum.
9) Kebijakan pembangunan infrastruktur kepariwisataan di Bali tidak berdasarkan pengaruh keunikan budaya Bali, karena kebijakan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk kepentingan lebih luas, yang tidak hanya untuk kepentingan sektor pariwisata saja tetapi untuk kepentingan masyarakat umum.
10) Kebijakan pembangunan infrastruktur kepariwisataan di Bali telah berdasarkan pengaruh keramahan masyarakat Bali, karena kebijakan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk kepentingan lebih luas termasuk juga untuk kepentingan masyarakat umum.
11) Kebijakan pembangunan infrastruktur kepariwisataan di Bali tidak berdasarkan Pengaruh berkembangnya Hotel dan Restoran di Bali, karena kebijakan pembangunan infrastruktur

dilakukan untuk kepentingan lebih luas, yang tidak hanya untuk kepentingan sektor pariwisata saja tetapi untuk kepentingan masyarakat umum.

12) Kebijakan pembangunan infrastruktur kepariwisataan di Bali telah berdasarkan pengaruh berkembangnya Biro Perjalanan Wisata di Bali, karena kebijakan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk kepentingan lebih luas termasuk juga untuk kepentingan biro perjalanan wisata yang dimiliki oleh masyarakat Bali.
13) Kebijakan pembangunan infrastruktur kepariwisataan di Bali tidak berdasarkan pengaruh berkembangnya moda transportasi di Bali, karena kebijakan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk kepentingan lebih luas, yang tidak hanya untuk kepentingan sektor usaha otomotif saja tetapi untuk kepentingan masyarakat umum.

Saran

Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata di Bali berkaitan dengan berbagai usaha untuk menyediakan jasa dan hospitalitas sehingga kelancaran perjalanan wisata dapat diperankan oleh masyarakat sehingga masyarakat lokal menjadi pelaku usaha penyediaan jasa, seperti fasilitas akomodasi, atraksi, akses dan amenitas, serta jasa-jasa lainnya yang bersifat intangible. Kesimpulan hasil penelitian, maka saran diberikan sebagai berikut:

1) Isu perubahan kebijakan dalam konteks kepemimpinan transformatif pemerintah daerah Provinsi Bali dalam melakukan perubahan secara strategis sebaiknya tetap sesuai dengan dinamika perubahan dan perkembangan industri kepariwisataan di Bali berdasarkan harapan wisatawan, masyarakat lokal, dan dunia usaha yang didasarkan pada prinsip pembangunan kepariwisataan budaya yang berkelanjutan.
2) Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di Bali sebaiknya tetap berdasarkan pertimbangan pelestarian keindahan alam Bali, keunikan Budaya Bali, potensi keramahan Masyarakat Bali dimiliki oleh Destinasi Pariwisata Bali, hotel dan restoran karena mereka berkontribusi secara langsung terhadap pendapatan asli daerah, berkembangnya moda transportasi di Bali, dan juga mempertimbangkan masukan dari pelaku usaha jasa layanan perjalanan wisata yang ada Destinasi Pariwisata Bali walaupun mereka memiliki jangkauan layanan secara internasional.
3) Kebijakan pembangunan infrastruktur kepariwisataan di Bali sebaiknya juga tidak mengurangi keindahan alam Bali, tidak mengurangi keunikan budaya Bali, memperhatikan berkembangnya hotel dan restoran di Bali, berkembangnya moda transportasi di Bali. Kebijakan pembangunan infrastruktur kepariwisataan di Bali telah berdasarkan pengaruh keramahan masyarakat Bali, sehingga kebijakan pembangunan infrastruktur tetap dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum dan tidak hanya untuk kepentingan pariwisata saja. Begitu juga dengan kebijakan pembangunan infrastruktur dilakukan juga untuk kepentingan lebih luas termasuk juga dengan mempertimbangkan masukan dari biro perjalanan wisata yang beroperasi di Bali.

Selain peran masyarakat lokal, peran investor juga diperlukan untuk pengaturan lalu-lintas perjalanan wisatawan dan penyediaan media atau paket-paket perjalanan yang memungkinkan wisatawan mampu memperoleh nilai kepuasan berwisata. Menangkap dinamika perkembangan destinasi pariwisata Bali, diperlukan kebijakan pembangunan pariwisata secara konsisten yang menitikberatkan perhatiannya pada upaya-upaya peningkatan manfaat sosial, ekonomi, budaya, psikologi perjalanan wisata bagi masyarakat dan wisatawan, dalam hal ini adalah perencanaan kebijakan dan pengembangan pariwisata sebagai jembatan membangun isu perubahan atau dalam artian bahwa perubahan kepemimpinan juga diperlukan untuk menjawab

isu-isu perubahan dalam pengelolaan pembangunan pariwisata (Pitana dan Gayatri, 2005; Ruspendi and Utama, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

Arismayanti, N.K., Widyatmaja, I.G.N., Wiraatmaja, I.W., 2017. The Establishment of Rural Tourism Based Creative Economy in Kendran Village, Gianyar. *Udayana Journal of Social Sciences and Humanities*, p.11.

Butarbutar, R.R., Soemarno, S., 2012. Community Empowerment Efforts In Sustainable Ecotourism Management In North Sulawesi, Indonesia. *Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development*, *3*(1).

Butcher, K., 2003. *Roman Syria and the Near East*. Getty Publications.

Dolezal, C., 2011. Community-Based Tourism in Thailand: (Dis-) Illusions of Authenticity and the Necessity for Dynamic Concepts of Culture and Power. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, *4*(1), pp.129-138.

Hall, B.L., Clover, D., 2005. Social movement learning. *International encyclopedia of adult education*, pp.584-589.

Hall, S., 1996. Who needs an identity. *Questions of cultural identity*, *16*(2), pp.1-17.

Jha, N., Schoenfelder, J.W., 2011. Studies of the subak: New directions, new challenges. *Human Ecology*, *39*(1), pp.3-10.

Junaedi, I.W.R., and Utama, I.G.B.R., 2017. Agrotourism as the economic transformation of the tourism village in Bali (case study: Blimbingsari Village, Jembrana, Bali). *Journal of Business on Hospitality and Tourism*, *2*(1), pp.10-24.

Kartono, Kartini. 2003. *Pemimpin Dan Kepemimpinan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mago, Y.M.F., 2011. Community Capacity Building for Ecotourism: A Literature Review. In *2011 Conference Proceedings Conference Proceedings* (p. 185)

Middleton, F.A., and Strick, P.L., 1994. Anatomical evidence for cerebellar and basal ganglia involvement in higher cognitive function. *Science*, *266*(5184), pp.458-461.

Mitas, O., Blapp, M., Gosana, D., Frischknecht, A., 2017. Creative tourism in Bali's rural communities (by Manuela Blapp) & Respond to Manuela Blapp (by Djinaldi Gosana) &" Respecting creativity": response to Manuela Blapp (by Astrid Frischknecht) &" Smart growth or sweet dreams?": response to Manuela Blapp (by Ondrej Mitas). *Tourism Destination Management Insights*, *1*(1), pp.19-24.

Moejiono, Imam. 2002. Kepemimpinan dan Keorganisasian, Yogyakarta, UII Press.

Pitana, IG., Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata, Kajian sosiologis terhadap struktur, sistem, dan dampak-dampak pariwisata*. Yogyakarta : Andi Offset.

Rocharungsat, P., 2005. *Community-based tourism: Perspectives and future possibilities* (Doctoral dissertation, James Cook University).

Rosalina, P.D., 2017. The Implementation of Hindu Philosophy “Tri Kaya Parisudha” for Sustainable Tourism in Munduk Village, North Bali. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA).*

Sutawa, G.K., 2012. Issues on Bali tourism development and community empowerment to support sustainable tourism development. *Procedia Economics and Finance*, *4*, pp.413-422.

Trimurti, Christimulia Purnama., I Gusti Bagus Rai Utama. 2020. The Examination Bali Destination Marketing Chain Model Based On Tourist Motivation. *International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 9, Issue 03, March 2020.* Pp 4491-4495

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan bahwa kepariwisataan.

Utama, I Gusti Bagus Rai., Christimulia Purnama Trimurti, 2020. Investigation Of The Image Of Buyan Tamblingan Area As Tourist Attraction. *International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 9, Issue 03, March 2020.* Pp 5234-5238

Utama, I.G.B.R. and Junaedi, I.W.R., 2015. *Agrowisata Sebagai Pariwisata Alternatif Indonesia: Solusi Masif Pengentasan Kemiskinan*. Deepublish.

Utama, I.G.B.R. and Mahadewi, N.M.E., 2012. *Metodologi penelitian pariwisata dan perhotelan*. Yogyakarta: Andi.

Utama, I.G.B.R., 2015. *Pengantar Industri Pariwisata*. Yogyakarta: Deepublish.

Utama, I.G.B.R., 2017. Pemasaran *Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.

Wang, N., 1999. Rethinking authenticity in tourism experience. *Annals of tourism research*, *26*(2), pp.349-370.

World Tourism Organization. 2020. <http://www.world-tourism.org/>. Accessed May 23, 2003.

World Travel and Tourism. Council. 1996. Travel and Tourism. Press Release. Brussels, Belgium: WTTC.